

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hijriani, Latifah et al. (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menjelaskan bahwa Leverage memiliki nilai 0,328 dan Ukuran Perusahaan memiliki nilai 0,595 untuk uji parsial Current ETR sedangkan dari hasil uji parsial Gaap ETR, Leverage memiliki nilai 0,307 dan Ukuran perusahaan Perusahaan memiliki nilai 0,114. Yang artinya bahwa variabel Leverage dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak. Dikarenakan perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki Negara, sehingga lebih diawasi oleh Negara. Selain itu, pada tahun penelitian beberapa perusahaan BUMN sedang siawasi oleh BPK karena penunggakan pajak.

Putri and Putra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Menjelaskan bahwa Leverage memiliki nilai signifikan sebesar 0,0000 yang artinya memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* karena semakin tinggi nilai dari rasio leverage berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak

perusahaan, maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah. Sehingga penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. sehingga pihak manajemen akan memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari utang agar laba perusahaan akan semakin kecil karena adanya biaya bunga yang besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah. Ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0110 yang berarti berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar CETR pada perusahaan yang berarti menurunnya tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Sandra and Anwar (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. Menjelaskan bahwa CSR memiliki nilai signifikansi 0,037 yang berarti variable CSR secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan pengaruh yang bersifat negatif karena Semakin tinggi tingkat pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) akan menurunkan praktek penghindaran pajak pada perusahaan. Intensitas Aset Tetap memiliki nilai signifikansi 0,022 Dengan demikian, maka Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak Hal ini terjadi karena Asset tetap perusahaan setiap tahunnya akan menimbulkan beban penyusutan yang secara langsung dapat

mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Semakin tinggi capital intensity perusahaan maka akan semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

Astrianti and Triyanto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif, Proporsi Komisaris Independen, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa Intensitas Aset Tetap memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0029 maka dapat disimpulkan bahwa Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan pengaruh yang bersifat negatif

Eka, et al (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage, ROA, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Dagang Besar Yang Terdaftar di BEI menjelaskan bahwa Intensitas Aset Tetap memiliki signifikansi sebesar 0,148 yang berarti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak maka dapat disimpulkan Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang besar tidak menjamin dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hal mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Penyimpangan aset tetap yang besar oleh suatu perusahaan bukan semata – mata untuk menghindari pajak melainkan bertujuan untuk menjalankan operasional perusahaan

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dengan para *stakeholdernya*. *Stakeholder* adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan. Fokus utama dalam teori ini, yaitu bagaimana perusahaan memonitor dan memberikan manfaat bagi *stakeholdersnya*. Gray *et al.* (1994) mengatakan bahwa: “Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang memengaruhi mereka. Pada awalnya, pemegang saham sebagai satu-satunya stakeholder perusahaan. Pandangan ini di dasarkan pada argumen yang disampaikan Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian, Freeman and Reed (1983) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi stakeholder dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan (*adversarial group*) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator. Menurut Chariri and Ghazali (2007), Teori Stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah

yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk mengungkapkan atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder.

Meskipun *stakeholder theory* mampu memperluas perspektif pengelolaan perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan dengan stakeholder, teori ini memiliki kelemahan. Gray (1997) mengatakan bahwa kelemahan dari stakeholder theory terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan dalam mengatur stakeholder-nya. Perusahaan hanya diarahkan untuk mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan berpengaruh dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa stakeholder theory mengabaikan pengaruh masyarakat luas (*society as a whole*) terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan Chariri and Ghazali (2007).

2. Penghindaran Pajak

Balter (2005) menyatakan, bahwa penghindaran pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi utang pajak dengan cara tertentu tanpa harus melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran Pajak adalah salah satu cara untuk melakukan penghindaran dalam membayar pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan karena dapat

dikatakan penghindaran pajak yang dilakukan merupakan cara memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan cara perusahaan untuk dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan tetap mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan ini akan berdampak pada penerimaan Negara dari sektor pajak Ngadiman and Puspitasari (2017). Mengurangi beban pajak didalam penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan transaksi yang merupakan bukan objek pajak, contohnya pada perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan termasuk objek pajak PPh pasal 21. Dengan demikian, akan terjadi penghematan pajak antara 5% -35%.

Penghindaran pajak dapat diukur dengan ETR. Ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Hanlon and Heitzman (2010). *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai pengukuran dalam penghindaran pajak merupakan tarif yang mencerminkan beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh wajib pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) dihitung dari jumlah pajak penghasilan terutang dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak. Semakin besar tarif pajak efektif perusahaan maka akan menunjukkan semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Tarif pajak efektif

dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai kelayakan sistem pajak yang berkaitan dengan perusahaan (badan). Hal ini dikarenakan melalui *Effective Tax Rate* (ETR) maka pihak yang berkepentingan dapat melihat efek dari berbagai insentif pajak dan tarif pajak perusahaan.

3. Intensitas Aset Tetap

Warren, Reeve et al. (2017) menjelaskan bahwa aset tetap merupakan aset jangka panjang yang bersifat permanen yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Kieso, Weygandt et al. (2016) mengelompokkan aset tetap menjadi dua jenis yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud merupakan aset tetap yang memiliki wujud dan fisik permanen dan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan, PSAK No 16 revisi 2011 mengelompokkan aset tetap berwujud menjadi beberapa jenis, yaitu tanah, tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan dan peralatan kantor. Aset tidak berwujud merupakan aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa adanya wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan lainnya. PSAK No 19 revisi 2010 memberikan contoh paten, hak cipta, lisensi, izin rute, merek dagang sebagai bentuk dari aset tidak berwujud. Pengkategorian aset tetap tersebut mempengaruhi istilah pengalokasian penurunan nilai guna dari aset tetap tersebut yang disebut dengan penyusutan. Depresiasi merupakan istilah penyusutan yang digunakan untuk kategori aset berwujud. Sedangkan aset tidak berwujud akan disusutkan melalui proses amortisasi.

Perhitungan penyusutan akan dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi selama periode berjalan. Dengan demikian, keputusan investasi pada aset tetap berkaitan dengan praktik manajemen laba dan pajak melalui intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan. Jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Perusahaan yang memutuskan berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan dan akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Di dalam PSAK No. 16 Tahun 2007 yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Nilai yang dapat diakui sebagai aset tetap dalam standar ini dapat dikategorikan dalam dua macam. Yaitu biaya perolehan awal dan biaya-biaya setelah perolehan.

Biaya perolehan awal sendiri baru boleh diakui sebagai aset tetap adalah jika:

- a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas
- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (PSAK No.16 Tahun 2007)

Intensitas aset tetap perusahaan adalah menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya Sundari and Aprilina (2017). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan di dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan.

4. Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham (2010) Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Kemudian Richardson and Lanis (2007) mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan melakukan penghindaran pajak, yang diindikasikan dengan adanya effective tax rate (ETR) yang rendah. Kecenderungan melakukan penghindaran pajak ini disebabkan karena perusahaan berukuran besar cenderung memiliki sumber daya lebih besar dibanding perusahaan yang berukuran kecil dalam melakukan pengelolaan beban pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan misalnya, diperlukan perusahaan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajaknya. Sedangkan perusahaan berukuran kecil tidak dapat optimal dalam mengelola pajaknya karena kekurangan sumber daya untuk memperoleh bantuan ahli perpajakan. Nicodème (2007).

Putri and Putra (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari tindakan perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan dan juga kestabilan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas prekonomian yang terjadi di perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total jumlah penjualan, total aktiva perusahaan, rata-rata tingkat penjualan dan nilai pasar saham. Biasanya, perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses yang mudah dan luas untuk memperoleh pinjaman dan pendanaan dari luar untuk mengembangkan usaha guna bertahan dalam persaingan industry Waluyo and BASRI (2015). Ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Semakin besar total asset perusahaan berarti semakin besar pula ukuran perusahaan.

5. Leverage

Penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan, baik yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun sumber pembiayaan jangka panjang akan menimbulkan suatu efek yang biasa disebut dengan leverage. Gibson (1990) menyatakan bahwa *“the use of debt, called leverage, can greatly affect the level and degree of change in the common earning”*, artinya penggunaan hutang, disebut pengungkit, sangat dapat memengaruhi tingkat derajat dan tingkat perubahan pendapatan saham. Pengertian *Leverage* mengacu pada penggunaan *asset* dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan *asset* (aktiva) atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan.. Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Permasalahan leverage akan selalu dihadapi oleh perusahaan, bila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi maupun biaya finansial. Biaya tetap operasi merupakan beban atau biaya tetap yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi pelaksanaan investasi, sedangkan biaya finansial merupakan beban atau biaya yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi pendanaan. Jadi, beban atau biaya tetap sebenarnya merupakan risiko yang harus ditanggung perusahaan dalam pelaksanaan keputusan keuangan. Besar kecilnya risiko tersebut perlu diketahui agar dapat diantisipasi dengan meningkatkan volume kegiatan usaha.

Perusahaan yang menggunakan hutang akan memiliki beban bunga yang harus dibayar. Dalam Peraturan perpajakan, yakni dalam pasal 6 ayat 1 angka 3 UU nomer 38 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak perusahaan. Peraturan ini memiliki implikasi bahwa semakin besar beban bunga yang dimiliki perusahaan, semakin besar pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu perusahaan dengan leverage yang tinggi berarti memiliki hutang yang lebih banyak dibanding ekuitasnya. Hal ini dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam menanggung beban hutang berupa beban hutang pokok maupun bunga. Kesulitan

menanggung beban hutang ini dapat menggiring perusahaan untuk melakukan penghematan beban pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Penghindaran Pajak*

Perusahaan yang ukurannya besar biasanya memiliki laba yang tinggi dan memiliki total aset yang besar yang dapat digunakan untuk aktivitas tax planning. Sehingga dari aktivitas tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak. Namun ada kemungkinan perusahaan dengan ukuran besar tidak melakukan penghindaran pajak, menurut penelitian Eka, et al (2019) menyatakan bahwa perusahaan dengan skala besar akan lebih cenderung melaporkan kondisi perusahaannya lebih spesifik dan akurat. Perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dengan ukuran besar akan lebih menonjol dan mudah untuk diawasi daripada perusahaan kecil, hal ini diperkuat Trotman dan Bradley (1981) yang menyatakan bahwa perusahaan yang ukurannya besar melakukan aktivitas yang lebih banyak pula dan akan memberikan dampak yang besar dan dapat menyebabkan lebih mudahnya diawasi. Dalam hal ini perusahaan lebih baik berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam hal pengelolaan perusahaan bagi stakeholdernya dengan tidak melakukan penghindaran pajak dan lebih memilih menghindari resiko.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2. Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Pembayaran pajak yang terjadi di perusahaan dapat dipengaruhi oleh intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap ini dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Hal ini diperkuat Dharma and Ardiana (2016) yang menyatakan depresiasi pada aset memungkinkan aset tetap perusahaan dapat memotong pajak untuk meningkatkan laba perusahaan. Dalam meningkatnya laba tersebut perusahaan dapat memberikan manfaat untuk stakeholdernya, hal ini juga diperkuat oleh argumen Friedman (1962) yang menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya (*stakeholder*). Dalam memenuhi kemakmuran stakeholdernya perusahaan bisa menggunakan cara meningkatkan *earning per share* dengan melakukan penghindaran pajak. Karena dalam penggunaan maupun penambahan aset tetap pada perusahaan dapat menimbulkan beban depresiasi yang dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan dan dapat membuat laba perusahaan meningkat, maka dari meningkatnya laba tersebut maka *earning per share* perusahaan juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₂: Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

3. *Leverage* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Fokus teori *stakeholder* mengacu pada pengambilan keputusan manajerial untuk membuat perusahaan berusaha memberikan manfaat bagi para *stakeholder*, perusahaan dalam memberikan manfaatnya bisa dalam hal pemberian *earning per share* yang tinggi. Hal ini juga diperkuat oleh Chariri dan Ghazali (2007) bahwa teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya. Dalam memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya* perusahaan bisa menggunakan *leverage* sebagai cara untuk mengurangi pajak yang dapat mempengaruhi peningkatan laba perusahaan. *Leverage* adalah intensitas penggunaan utang sebagai sumber dana perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang akan memiliki beban bunga yang harus dibayar. Dalam Peraturan perpajakan, yakni dalam pasal 6 ayat 1 angka 3 UU nomer 38 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak perusahaan. Peraturan ini memiliki implikasi bahwa semakin besar beban bunga yang dimiliki perusahaan, semakin besar pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Surbakti (2012) yang menyatakan bahwa penambahan jumlah utang akan mengakibatkan menambahnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang dan membuat laba perusahaan meningkat. Maka dalam hal ini perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi cenderung

melakukan penghindaran pajak.. Dari penghindaran pajak tersebut maka *earning per share* perusahaan bisa ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₃: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan hipotesis yang dipaparkan di atas, maka dapat dibuat kerangka penelitian sebagai berikut :

